EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10955

Kebijakan Fiskal dari Perspektif Islam

Pandapotan Ritonga[1*] dan M. Shabri Abd. Majid[2]
[1]Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20221, Indonesia
[2]Universitas Syiah Kuala Jl. Teuku Nyak Arief No.441, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23111, Indonesia
*e-mail : pandapotanritonga@umsu.ac.id

Artikel Info

Received :
12 July 2022
Revised :
14 March 2023
Accepted :
01 July 2023

Kata Kunci :
Kebijakan Fiskal, Perspektif Islam.

Keywords:
Fiscal Policy, Islamic Perspective.

ABSTRAK

Agar visi Indonesia 2045 menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur, maka arah kebijakan fiskal harus dibentuk untuk mencerminkan dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan selalu mendukung keberlanjutan. Oleh karena itu, pengembangan APBN sebagai alat kebijakan fiskal harus didorong agar lebih sehat dalam jangka panjang dan mampu mengelola risiko sehingga fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dapat dioptimalkan. Tentunya kebijakan ekonomi negara diharapkan sesuai dengan prinsip dan nilai Islam, karena tujuan utama Islam adalah kesejahteraan seluruh umat manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan perpajakan mewujudkan masyarakat yang berlandaskan keseimbangan distribusi kekayaan dengan menyeimbangkan nilai material dan spiritual. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknologi perpustakaan atau dokumen tertulis lainnya serta jurnal, buku dan literatur lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk menjamin stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Alat kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Memahami perspektif Islam tentang pengeluaran pemerintah harus diakui. Pertama, belanja pemerintah dapat dibagi menjadi belanja saat ini dan belanja modal. Kedua, tujuan kebijakan pajak dan pengeluaran pemerintah tercermin dalam redistribusi pendapatan, pengeluaran untuk penyediaan pelayanan publik, produksi barang publik yang tidak dapat disediakan oleh pasar, dan penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Dengan semua sistem kontrol, keuntungan dari masing-masing sistem harus dipertimbangkan dan digabungkan. Dalam arti tertentu, perpajakan modern menerima ide-ide etis dan perpajakan Islam menerima teori dan aplikasi pajak modern.

Fiscal Policy from an Islamic Perspective

ABSTRACT

In order for Indonesia's 2045 vision to become a sovereign, developed, just and prosperous country, the direction of fiscal policy must be shaped to reflect the dynamics of the economy, respond to

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10955

challenges and always support sustainability. Therefore, the development of the State Budget as a tool for fiscal policy must be encouraged so that it is healthier in the long run and is able to manage risks so that the allocation, distribution and stabilization functions can be optimized. Of course, the country's economic policy is expected to be in accordance with Islamic principles and values, because the main goal of Islam is the welfare of all mankind. The purpose of this study is to find out how tax policy creates a society based on a balanced distribution of wealth by balancing material and spiritual values. This study uses descriptive methods, data collection techniques are carried out using library technology or other written documents as well as journals, books and other literature. The results of the study show that fiscal policy is a policy that regulates government revenues and expenditures to ensure stability and encourage economic growth. The tools of fiscal policy are government revenues and expenditures. Understanding the Islamic perspective on government spending must be acknowledged. First, government spending can be divided into current spending and capital spending. Second, the objectives of government tax and spending policies are reflected in the redistribution of income, spending on the provision of public services, the production of public goods that cannot be provided by the market, and the provision of infrastructure to increase economic productivity. With all control systems, the advantages of each system must be considered and combined. In a sense, modern taxation accepts ethical ideas and Islamic taxation accepts modern tax theory and applications.

PENDAHULUAN

Perekonomian negara adalah indikator yang jelas dari keberhasilan negara. Itu sebabnya pemerintah selalu menjaga stabilitas ekonomi. Stabilitas sistem keuangan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu stabilitas pasar barang dan jasa, stabilitas pasar uang, dan stabilitas pasar eksternal. Untuk mencapai stabilitas ekonomi, pemerintah harus merumuskan kebijakan dengan berbagai strategi, antara lain kebijakan fiskal dan moneter. Meskipun terdapat kesamaan antara kebijakan fiskal Islam dan konvensional, namun terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Jika dalam sistem tradisional pengertian tentang kesejahteraan yang dapat dicapai adalah untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi individu dalam kehidupannya, terlepas dari kebutuhan spiritualnya, maka dalam sistem Islam pengertian tentang kesejahteraan sangat luas dan mencakup kehidupan. dunia dan dunia luar. dan penyembuhan spiritual lebih ditekankan daripada harta benda.

Agar visi Indonesia 2045 menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur, maka orientasi kebijakan fiskal harus dibentuk untuk mencerminkan dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan selalu mendukung keberlanjutan. Pembangunan Oleh karena itu, APBN sebagai instrumen kebijakan keuangan harus semakin sehat dan dapat dikelola risikonya dalam jangka panjang agar fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dapat terpenuhi secara optimal. Selain itu, pengelolaan APBN yang baik untuk memastikan kesinambungan ekonomi makro (keuangan) jangka panjang dapat terjaga dengan baik sehingga berdampak positif bagi perekonomian dan meningkatkan keseimbangan fiskal negara. Tentunya kebijakan keuangan pemerintah diharapkan sesuai dengan prinsip dan nilai

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10955

Islam, karena tujuan utama Islam adalah mencapai kesejahteraan seluruh umat manusia (Rozalinda, 2014). Tentu saja, tujuan dari prinsip keuangan Islam adalah untuk mengembangkan masyarakat berdasarkan distribusi kekayaan yang adil dengan menyamakan nilai material dan spiritual. Kebijakan fiskal dipandang sebagai alat untuk mengatur dan mengontrol perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh insentif pendapatan pemerintah (pajak, kredit, atau jaminan belanja pemerintah).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya tentang kebijakan fiskal dalam perspektif Islam didasarkan pada pemerataan kekayaan yang adil dengan menempatkan nilai material dan spiritual yang seimbang untuk mencapai visi Indonesia 2045. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan perpajakan mewujudkan masyarakat yang berlandaskan keseimbangan distribusi kekayaan dengan menyeimbangkan nilai material dan spiritual. Kegunaan dari hasil penelitian ini dapat mengidentifikasi segala kebutuhan informasi terkait kebijakan fiskal dari sudut pandang Islam.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Kebijakan Fiskal

Pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang ditempuh pemerintah dengan cara menambah atau mengurangi pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti: B. pengurangan pengangguran atau tercapainya pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Instrumen terpenting untuk ini adalah pengeluaran pemerintah dan pajak. Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian pengeluaran dan pendapatan publik untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi dengan mengubah pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Menurut Zaini Ibrahim (2013), kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan output ekonomi melalui mekanisme pendapatan dan belanja pemerintah. Kebijakan fiskal berkaitan dengan pengaturan pengeluaran publik dan pajak, yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan agregat dan juga harga. Inflasi dapat dicegah dengan mengurangi permintaan agregat. Kebijakan fiskal yang diterapkan dalam bentuk pemotongan pengeluaran pemerintah dan kenaikan pajak dapat menurunkan permintaan agregat untuk menekan inflasi.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang mengatur pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk mempertahankan kegiatan ekonomi yang diinginkan atau kondisi yang lebih baik. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah, yang berkaitan erat dengan perpajakan.

- Pengeluaran/pengeluaran pemerintah (G = pengeluaran publik)
- Pajak (T = pajak)

Kebijakan fiskal juga dapat digambarkan sebagai salah satu kebijakan ekonomi makro terpenting dalam keadaan berikut:

- Membantu meminimalkan fluktuasi siklus
- Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesempatan kerja yang tinggi
- Bebas dari inflasi yang tinggi atau tidak stabil.

Fungsi kebijakan fiskal diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 pasal 3 ayat 4 tentang Keuangan Negara, yaitu fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, stabilisasi, dan distribusi.

- Fungsi otoritas adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk mencari pendapatan dan belanja untuk tahun yang bersangkutan.

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10955

- Fungsi perencanaan merujuk ketika anggaran negara menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan.
- Fungsi pengawasan adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- Fungsi alokasi, yaitu ketika anggaran negara dialokasikan untuk tujuan mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta menambah efisiensi dan efektivitas perekonomian negara.
- Fungsi stabilisasi, yaitu ketika anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.
- Fungsi distribusi, yaitu ketika kebijakan negara membuat kebijakan anggaran dengan adil dan rasa kepatutan

Kebijakan fiskal akan memainkan peran yang jauh lebih penting dalam ekonomi Islam daripada dalam ekonomi pasar bebas non-lslamic karena alasan berikut.

1. Peran kebijakan moneter akan relatif jauh lebih terbatas dalam ekonomi Islam daripada dalam ekonomi pasar bebas non-lslamic karena setidaknya dua alasan:
   - Tingkat bunga tidak memainkan peran apa pun dalam ekonomi Islam. Muslim dilarang untuk menerima bunga atas segala jenis pinjaman (pribadi atau lainnya). Dengan demikian dalam ekonomi Islam variasi suku bunga sebagai alat penting kebijakan moneter tidak ada.
   - Islam tidak mengizinkan perjudian. Ini berlaku tidak hanya untuk ras, permainan kartu dan kegiatan perjudian konvensional lainnya tetapi juga untuk banyak jenis spekulasi dan transaksi forward tertentu yang terjadi di ekonomi non-lslamic. Ini memiliki dua implikasi:
     1) Operasi pasar terbuka tidak akan terlalu efektif dalam ekonomi Islam. Bursa saham pasti tidak akan memainkan peran besar dalam ekonomi ini seperti dalam ekonomi pasar bebas non-lslamic di mana spekulasi merupakan bagian integral dari kehidupan ekonomi,
     2) Tidak akan ada permintaan spekulatif untuk uang dalam arti Keynesian. Namun, kemungkinan memegang uang tunai untuk menunggu peluang yang lebih menguntungkan diperbolehkan. Permintaan uang kesempatan ini akan dikenakan pada Zakat dan iuran dengan uang tunai menganggur. Tidak adanya "permintaan spekulatif Keynesian" untuk uang dan tidak adanya bunga menyiratkan bahwa pasar obligasi tidak akan memainkan peran penting dalam ekonomi Islam.
2. Terlepas dari kondisi keuangan ekonomi Islam, pemerintahan Islam yang ketat harus memastikan bahwa zakat (pajak agama) dikenakan pada setiap Muslim yang hartanya melebihi nilai minimum tertentu dan pendapatannya digunakan dalam Bab (atau Surah) 9. Ayat 60 Al-Qur'an. Alat kebijakan fiskal bawaan ini unik dalam ekonomi Islam7. Namun, seperti yang akan kita lihat nanti, pajak zakat.

Perbedaan Kebijakan Fiskal Konvensional dan Kebijakan Fiskal Islam

1. Kebijakan Fiskal dalam segi Konvensional

Fungsi fiskal konvensional adalah fungsi pada tingkat ekonomi, yang sebagian besar identik dengan kemampuan negara saat ini untuk menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya dan kemudian mengalokasikan anggaran yang ada, atau dapat disebut anggaran negara, dan juga mendistribusikannya. untuk mencapai apa yang disebut efisiensi anggaran. Meskipun alat fiskal yang dapat digunakan adalah pajak dan anggaran. Menurut

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10955

ekonomi Islam, pendapatan dan anggaran adalah alat yang ampuh untuk mencapai tujuan keuangan.

2. Tujuan kebijakan fiskal Konvensional

Adapun tujuan dari kebijakan pemerintah menurut Sukirno, yaitu dilihat berdasarkan dua tujuan yakni tujuan yang berifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial dan politik.

1. Tujuan yang bersifat ekonomi, Ada tiga faktor yang menjadi pertimbangan utama, yakni:
   a. Menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat
   b. Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat
   c. Memperbaiki distribusi pendpatan masyarakat serta mengurangi ketimpangan dalam masyarakat.
2. Tujuan yang bersifat sosial politik
   a. Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga
   b. Menghindari masalah-masalah sosial, keamanan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat
   c. Mewujudkan kesetabilan politik dalam ekonomi konvesional kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam system pajak atau dalam pembelanjaan (dalam konsep makro disebut dengan government expenditure). Tujuan kebijakan fiskal dalam perekonomian sekuler adalah tercapainya kesejahteraan, yang didefenikan sebagai adanya benefit maksimal bagi individu dalam kehidupan tanpa memandang kebutuhan spiritual manusia. Fiskal terutama ditujukan untuk mencapai alokasi sumber daya secara efesian, stabilitas ekonomi, pertumbuha, dan distribusi pendapatan serta kepemilikan.

3. Kebijakan Fiskal Islami

Kebijakan fiskal Islam adalah kebijakan pengaturan pengeluaran dan pendapatan pemerintah dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan dan mencapai kemakmuran yang sebesar-besarnya di dunia dan sekitarnya. Kebijakan fiskal telah dikenal dalam teori ekonomi Islam sejak lama, sejak zaman Nabi Muhammad SAW. dan Khulafaur Rasyidin, yang kemudian dikembangkan oleh para ulama.

a. Tujuan Kebijakan Fiskal Islam
   Dalam Islam kebijakan fiskal dan anggaran ini bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama agar mencapai kemaslahatan.
b. Fungsi daripada sektor kebijakan fiskal menurut Islam adalah :
   1. Pemeliharaan terhadap hukum., keadilan dan juga pertahanan
   2. Perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi
   3. manajemen kekayaan pemerintah yang ada di dalam BUMN
   4. intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan

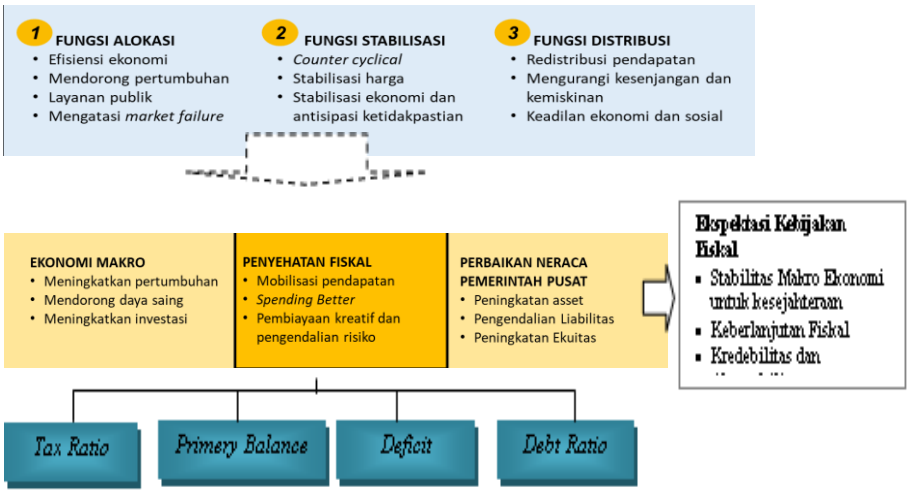
Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi tradisional, tetapi ada kesamaan dalam analisis dan perencanaan kebijakan ekonomi. Tujuan dari semua kegiatan ekonomi - semua orang - adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan hidup manusia, dan kebijakan publik merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam sistem tradisional, konsep kesejahteraan adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya bagi individu di dunia ini. Namun dalam Islam, konsep kesejahteraan sangat luas, mencakup kehidupan di dunia dan akhirat, dan penyembuhan spiritual lebih ditekankan daripada harta benda.

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10955

Menurut ilmu ekonomi Islam, kebijakan fiskal diharapkan dapat menjalankan fungsi alokatif, distribusi, dan stabilisasi di suatu negara dengan dimensi orientasi nilai, etika dan sosial tertentu dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Dalam ilmu ekonomi tradisional, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai tindakan pemerintah untuk mengubah sistem pajak atau pengeluaran, yang disebut dengan pengeluaran pemerintah dalam konsep makro (Nasution, 2006:203). Tujuannya tentu saja untuk mengatasi permasalahan ekonomi negara.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode library search karena setidaknya ada beberapa alasan dilakukannya hal tersebut. Pertama, sumber data tidak hanya bisa diperoleh dari lapangan. Terkadang sumber informasi hanya dapat diperoleh dari perpustakaan atau dokumen tertulis lainnya, baik itu majalah, buku atau literatur lainnya. Kedua, kajian pustaka diperlukan untuk memahami fenomena yang muncul yang tidak dapat dipahami, kemudian dengan bantuan kajian pustaka ini gejala-gejala tersebut dapat dipahami. Sehingga penulis dapat merumuskan suatu konsep untuk memecahkan masalah yang muncul ketika gejala yang muncul teratasi. Alasan ketiga adalah bahan pustaka masih dapat diandalkan untuk menjawab pertanyaan peneliti. Namun, pustakawan tetap dapat menggunakan informasi yang dikumpulkan orang lain atau informasi empiris, baik berupa buku, laporan ilmiah, maupun laporan penelitian. Dalam beberapa kasus, data lapangan belum cukup signifikan untuk menjawab pertanyaan penelitian.



Gambar 1. Kebijakan Fiskal

Fitur pada gambar 1 menunjukkan bahwa kebijakan fiskal adalah salah satu alat paling efektif untuk meminimalkan siklus bisnis. Karena terjadinya siklus ekonomi jangka pendek disebabkan oleh permintaan agregat dan penawaran agregat, maka untuk mengatasi hal tersebut pemerintah harus mengelola permintaan agregat dan penawaran agregat itu sendiri. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah melalui kebijakan fiskal yang tepat. Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi gejolak ekonomi yang apabila dilaksanakan dengan baik dan bijaksana pada prinsipnya dapat menstabilkan perekonomian dari gejolak ekonomi. Di sisi lain, jika kebijakan tidak diterapkan dan dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan masalah baru ketidakstabilan ekonomi. Langkah-langkah kebijakan fiskal untuk menstabilkan perekonomian adalah :

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10955

1. Melalui *automatic stabilizer* yaitu bentuk pengeluaran dan pendapatan publik yang dihasilkan dari fleksibilitas kebijakan fiskal secara otomatis. Misalnya, ketika pendapatan turun dan ekonomi mengalami resesi, pendapatan pajak otomatis turun dan pengeluaran pemerintah untuk tunjangan pengangguran otomatis meningkat.
2. Dengan kebijakan fiskal liberal yang melibatkan perubahan kebijakan aktif yang mempengaruhi belanja publik. Fase ini melibatkan pembuatan perubahan spesifik pada sistem yang ada untuk menanggapi masalah keuangan yang muncul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan fiskal harus menjadi salah satu kebijakan pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi dan efisiensi. Kebijakan fiskal adalah upaya atau tindakan pemerintah sebagai pengambil keputusan dengan mengubah penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah. Pajak dan pengeluaran publik merupakan variabel terpenting dalam kebijakan fiskal. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah untuk menstabilkan tingkat permintaan agregat dan output. Kebijakan moneter yang berlaku meliputi anggaran defisit, anggaran surplus, dan anggaran berimbang. Untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045, perlu disusun arah dan strategi kebijakan fiskal pada tiga tonggak jangka menengah yang saling berkaitan dan menguatkan, yaitu: Fase penguatan pondasi, fase transisi dan fase startup. Tahapan (milestones) orientasi kebijakan fiskal jangka panjang.



Gambar 2. Tahapan (milestones) orientasi kebijakan fiskal jangka panjang.

Fase penguatan inti (2020-2030) merupakan fase pertama yang difokuskan pada penguatan dan peningkatan daya saing. Langkah ini merupakan kunci sukses implementasi visi Indonesia 2045. Fase ini menjadi motivasi pemerintah untuk menghadapi tantangan demografi dengan melaksanakan reformasi di semua sektor sebelum berakhirnya masa tenggang demografi dan sebelum fase prakiraan jumlah penduduk. Penuaan. Pertumbuhan penduduk harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi, investasi dan produksi, serta daya saing. Reformasi terkait meliputi pajak, sumber daya manusia, program jaminan sosial, birokrasi, termasuk perubahan industri untuk meningkatkan daya saing nasional. Pemerintah menekankan reformasi untuk memperkuat sumber daya manusia agar inovatif, produktif dan kompetitif, serta kompatibel dengan perkembangan ekonomi informasi dan TIK. Selain itu, program perlindungan sosial harus direformasi agar lebih inklusif dan menyasar profil populasi tertentu. Transformasi sektoral adalah kunci untuk menghindari jebakan pendapatan menengah dengan memperluas infrastruktur pendukung, termasuk energi terbarukan (EBT),

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10955

pangan, air, konektivitas, dan telekomunikasi. Sehubungan dengan penguatan dan stabilitas keuangan publik, reformasi keuangan publik, pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah juga perlu dilanjutkan. Reformasi ini akan berhasil jika dilakukan oleh birokrasi yang efisien dan kompeten.

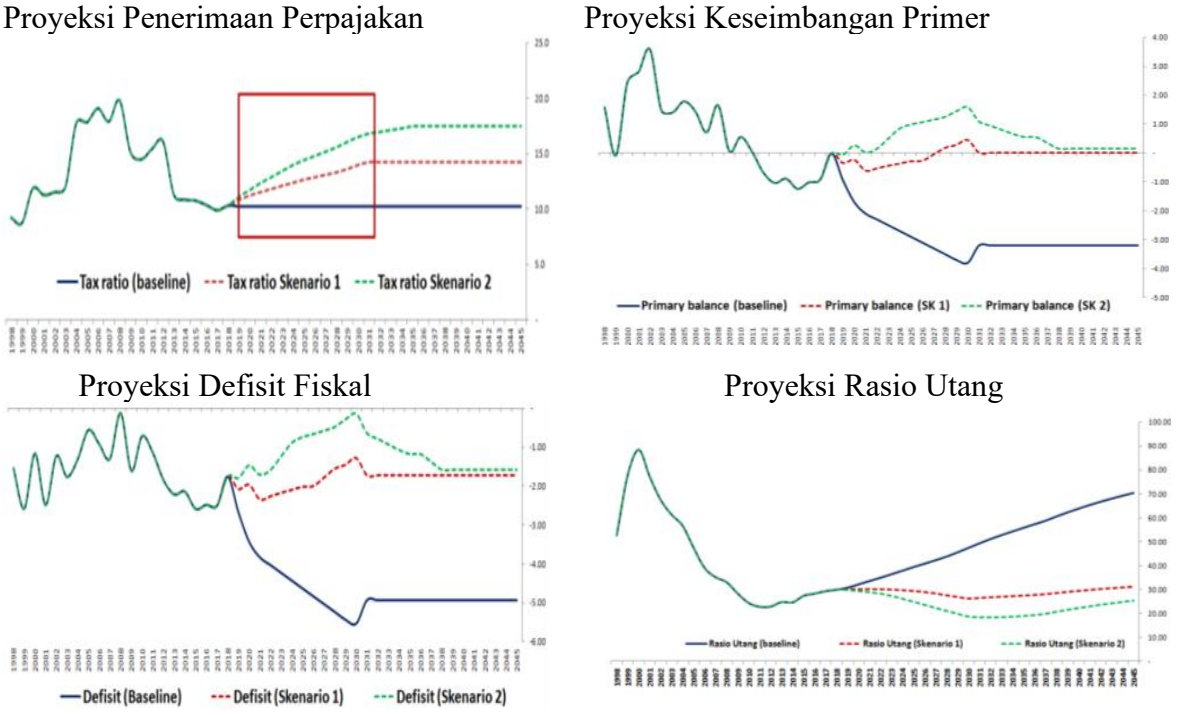
Selain itu, Indonesia akan memasuki masa transisi (2031-2035). Pada fase transisi ini, fokus kebijakan adalah memperkuat daya saing yang dicapai pada periode sebelumnya. Upaya tersebut akan dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih berdaya saing, mendorong pembangunan infrastruktur yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung perubahan industrialisasi, serta program perlindungan sosial yang komprehensif untuk memungkinkan hal tersebut. . untuk menyelesaikan tantangan. populasi yang menua. Pemerintah juga ingin memperkuat stabilitas, keamanan dan kelestarian lingkungan pertahanan. Dalam masa transisi ini, perekonomian harus semakin efisien, peran swasta harus meningkat dan APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal harus dikelola secara efektif dan efisien. Tarif pajak harus naik menjadi 13 sampai 16 persen dari produk domestik bruto dan 17 sampai 19 persen dari pengeluaran pemerintah. Kondisi ini membuka peluang untuk mendorong APBN menuju anggaran berimbang. Namun penerapannya masih perlu disesuaikan dengan fluktuasi bisnis (ekspansi atau kontraksi) guna menjaga kecepatan pertumbuhan ekonomi dan menghindari peluang.

Dengan basis ekonomi yang lebih kuat, Indonesia akan tumbuh (2036-2045). Pada titik ini, Indonesia diperkirakan akan keluar dari middle income trap. Kebijakan yang akan ditempuh difokuskan untuk menjaga momentum dan menjaga stabilitas. Kesejahteraan bangsa terpelihara dan didukung oleh program jaminan sosial yang handal serta politik dan keamanan dalam negeri yang stabil. Di sisi lain, kemandirian ekonomi diperkuat dengan dilaksanakannya kebijakan pembangunan dan industri berupa peningkatan investasi, konsumsi, dan ekspor barang dan jasa. Pada titik inilah Indonesia siap berkembang menjadi negara yang mandiri, adil dan makmur. Dalam implementasi langkah-langkah kebijakan jangka panjang tersebut, dipertimbangkan tiga skenario, yaitu:Baseline, Skenario 1 dan Skenario 2.

Pada skenario baseline, pemerintah hanya menerapkan kebijakan yang sudah ada, tidak banyak melakukan terobosan baru, dan kebijakan hanya dilaksanakan seperti biasa (BAU). Dengan basis ekonomi yang lebih kuat, Indonesia akan tumbuh (2036-2045). Pada titik ini, Indonesia diperkirakan akan keluar dari middle income trap. Kebijakan yang akan ditempuh difokuskan untuk menjaga momentum dan menjaga stabilitas. Kesejahteraan bangsa terpelihara dan didukung oleh program jaminan sosial yang handal serta politik dan keamanan dalam negeri yang stabil. Di sisi lain, kemandirian ekonomi diperkuat dengan dilaksanakannya kebijakan pembangunan dan industri berupa peningkatan investasi, konsumsi, dan ekspor barang dan jasa. Pada titik inilah Indonesia siap berkembang menjadi negara yang mandiri, adil dan makmur. Skenario 1 mengasumsikan bahwa pemerintah mencoba memanfaatkan pertumbuhan penduduk dengan menerapkan reformasi dan inovasi kebijakan bertahap. Dalam kondisi tersebut, pemerintah melakukan transformasi ekonomi, reformasi perpajakan, penguatan program jaminan Sosial, sumber daya manusia dan birokrasi. Reformasi dan inovasi tersebut telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sekitar 5-6 persen berkat sumber daya manusia yang lebih kompetitif, infrastruktur yang memadai, dan program jaminan sosial yang lebih andal. Terobosan telah dilakukan di bidang kebijakan perpajakan untuk merespon perkembangan TIK dan Industri 4.0. Suksesi diperkirakan akan meningkatkan pendapatan pajak sekitar 13% jika pengeluaran tumbuh 3% lebih cepat dari pertumbuhan alami. Seiring dengan bertambahnya

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10955

usia populasi, peningkatan pajak diperkirakan akan berakhir mulai tahun 2031, tetapi dengan tingkat yang relatif tinggi. Ini adalah hasil dari reformasi yang konsisten selama ledakan demografis. Untuk memenuhi tantangan demografis, perlu dibangun sistem jaminan sosial yang komprehensif dan andal, yang melindungi dari risiko sosial dan mencegah penuaan penduduk. Ke depan, jaminan sosial juga harus mampu memperkuat dan mendorong efisiensi masyarakat untuk lebih menjamin kesinambungan program dan kesinambungan keuangan publik dalam jangka panjang. Dengan perubahan ekonomi dan reformasi pajak, penerimaan pajak dapat meningkat secara signifikan dan pengeluaran bahkan dapat lebih baik menghadapi tantangan kebijakan pembangunan dengan bantuan kebijakan pajak yang lebih baik. Karena hambatannya masih cukup tinggi, reformasi ekonomi yang dilakukan belum mampu menjaga keseimbangan yang positif. Namun, defisit anggaran dan rasio utang masih dalam batas yang terkendali. Dalam Skenario 2, pemerintah harus melakukan reformasi dan inovasi kebijakan secara bertahap dan optimal, karena hambatannya relatif rendah. Efektivitas reformasi dan inovasi mendorong pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 6-7 persen. Hal ini terutama didukung oleh sumber daya manusia yang lebih kompetitif, infrastruktur pendukung yang memadai, dan program perlindungan sosial yang lebih andal. Dari sisi ekonomi, keberhasilan dan inovasi perpajakan lebih optimal dibandingkan skenario 1, sehingga penerimaan pajak dengan tambahan investasi 5 persen sekitar 15 persen (lebih tinggi dibandingkan skenario 1). Hal ini didukung oleh konsumsi yang lebih efisien dan pembebasan pajak yang lebih besar dari Skenario 1. Dengan cara ini, keseimbangan dasar dapat dijaga tetap positif dan defisit serta utang dalam batas-batas yang dapat dikelola. Ketiga skenario ini menunjukkan bahwa Indonesia dapat melambat selama transisi demografi tanpa inovasi dan reformasi kebijakan yang konsisten untuk mencapai tujuan Visi Indonesia 2045. Apalagi, inovasi dan reformasi tersebut penting untuk menjaga kesinambungan keuangan publik dalam jangka panjang. Pajak penghasilan tumbuh cukup pesat, neraca dasar dapat dikatakan positif dan defisit serta utang berada dalam batas aman (Gambar 3).



Gambar 3. Proyeksi Indikator Makro Fiskal 2020-2045

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10955

Keberlanjutan kebijakan fiskal jangka panjang merupakan faktor penting dalam implementasi Visi Indonesia 2045. Namun, ini hanya dapat dicapai melalui kombinasi kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan. Pengetatan kebijakan moneter dan pendalaman pasar keuangan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada dasarnya, negara harus menjadi model masyarakat. Negara harus membelanjakan sesuai dengan pendapatan. Situasi ini dikenal sebagai anggaran berimbang. Ketika pengeluaran pemerintah melebihi pendapatan, pemerintah harus meminjam uang dari masyarakat atau mencetak uang baru. Tindakan ini tentu saja sangat tidak rasional. Saat ini, di sebagian besar negara, pemerintah selalu berusaha menyeimbangkan pengeluarannya. APBN selalu menyesuaikan dengan kondisi ekonomi pada waktu tertentu. Ketika aktivitas ekonomi rendah dan banyak pengangguran, kemiskinan, bencana, dll., Pemerintah membelanjakan lebih banyak daripada yang diterimanya. Situasi ini menyebabkan defisit anggaran, tetapi ketika perekonomian berjalan dengan baik, kesempatan kerja penuh tercapai, kenaikan harga turun, pengeluaran daerah dihemat, dan negara menghemat pendapatannya. Situasi ini dikenal sebagai surplus anggaran:

- Perekonomian Indonesia tahun 2019 yang diukur dalam produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku adalah Rp15.833,9 triliun dan PDB per kapita adalah Rp59,1 juta atau USD4.174,9.
- Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,02 persen pada tahun 2019, turun dari 5,17 persen pada tahun 2018. Di sisi manufaktur, pertumbuhan terbesar sebesar 10,55 persen dicapai pada bidang jasa lainnya. Dari sisi pengeluaran, belanja konsumen lembaga nirlaba dalam negeri (PK-LNPRT) yang naik sebesar 10,62 persen mencapai peningkatan terbesar.
- Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 4,97 persen pada triwulan IV-2019 dibandingkan dengan triwulan IV-2018 (tahun y). Dari sisi manufaktur, pertumbuhan didorong oleh semua sektor, dengan pertumbuhan terbesar dicapai pada segmen Jasa Lainnya sebesar 10,78 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumen rumah tangga pribadi (PK-RT) tumbuh paling kuat sebesar 4,97 persen.
- Perekonomian Indonesia menyusut sebesar 1,74 persen (q-to-q) pada triwulan IV 2019 dibandingkan dengan triwulan III 2019. Dari sisi output, hal ini disebabkan oleh efek musiman pertanian, kehutanan, dan perikanan yang turun sebesar 20,52 persen. Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh ekspor barang dan jasa yang mengalami kontraksi sebesar 2,55 persen..
- Secara regional, struktur perekonomian Indonesia tahun 2019 didominasi oleh beberapa provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pangsa pulau Jawa dalam produk domestik bruto terbesar adalah 59,00 persen, diikuti pulau Sumatera 21,32 persen dan pulau Kalimantan 8,05 persen.
- Pajak Islam yang terkait dengan anggaran negara dikumpulkan melalui Zakat, Kharaj (pajak pertanian), Jizya (pajak individu), Khums (pajak militer), Usyur (pajak bisnis), Kalalah (orang yang tidak punya). warisan), kaffaras (denda), beasiswa dan pendapatan lain dari bisnis halal. Mengenai mekanisme penggunaan dana tersebut, ada instrumen yang menggunakan dana secara terbatas seperti: B. Zakat, dan ada juga yang tidak terbatas.
- Ada perbedaan mendasar antara sistem anggaran Islam dan modern dalam kaitannya dengan kebijakan anggaran pemerintah. Islam menitikberatkan pada persoalan melayani urusan umat, yang diwakili oleh syara dan diatur oleh pemahaman agama Islam. Berbeda dengan anggaran modern, lebih ditekankan pada kombinasi rencana dan proyek yang kompleks.

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 23, No.1 Juli 2023
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10955

Sebaliknya, berbagai instrumen digunakan dalam kebijakan fiskal Islam, salah satunya adalah zakat. Zakat adalah pembayaran yang dikenakan atas kekayaan bersih seseorang, dikumpulkan oleh pemerintah dan digunakan untuk tujuan tertentu, seperti B. jaminan sosial, harus dikonsultasikan. Dari segi ekonomi, zakat sekilas merupakan beban bagi pemilik harta sehingga mengurangi kemampuan keuangannya. Namun logika ini dibantah oleh Allah SWT melalui Kitab Suci Al-Quran yang menyatakan bahwa segala pengeluaran yang bertujuan untuk mencapai ridha Allah akan dibalas dengan pahala yang berlipat (baik harta maupun kebaikan lainnya) (QS. Al-Baqarah [2]) 251 dan QS. Ar-Ruum [30]:39).

Menerima zakat hanya sebagai tulang punggung perpajakan Islam dan kemudian menolak perpajakan hanya akan melahirkan konsep perpajakan Islam yang utopis. Untuk setiap sistem kontrol, keuntungan dari setiap sistem harus dipertimbangkan dan kemudian digabungkan. Dalam arti tertentu, perpajakan modern menerima ide-ide etis dan perpajakan Islam menerima ide-ide teoretis dan terapan fiskal modern. Zakat adalah perbedaan utama antara instrumen kebijakan konvensional dan kebijakan fiskal Islam.

SIMPULAN

Dalam ekonomi Islam, tujuan kebijakan fiskal adalah pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah, yang didistribusikan sesuai anggaran yang direncanakan dan pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada saat yang sama, peran pemerintah dalam pengelolaan anggaran negara diperlukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Negara harus membelanjakan sesuai dengan pendapatan. Situasi ini dikenal sebagai anggaran berimbang. Ketika pengeluaran pemerintah melebihi pendapatan, pemerintah harus meminjam uang dari masyarakat atau mencetak uang baru. Tindakan ini tentu saja sangat tidak rasional. Saat ini, di sebagian besar negara, pemerintah selalu berusaha menyeimbangkan pengeluarannya. APBN selalu menyesuaikan dengan kondisi ekonomi pada waktu tertentu. Ketika aktivitas ekonomi rendah dan banyak pengangguran, kemiskinan, bencana, dll., Pemerintah membelanjakan lebih banyak daripada yang diterimanya. Situasi ini mengakibatkan defisit anggaran. Tetapi jika ekonomi berjalan dengan baik, kesempatan kerja penuh tercapai, kenaikan harga diimbangi, pengeluaran daerah dapat dihemat sehingga negara menghemat pendapatan.

REFERENSI

Ahmed, Ziauddin., Iqbal, Munawar., & Khan, M. Fahim. (Eds.). (1983). *Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam*. Islamabad, Pakistan: Institute of Policy Studies & International Centre for Research in Islamic Economics.

Ariff, Mohammad. (Ed.). (1982). *Monetary and Fiscal Economics of Islam*. Jeddah, KSA: International Centre for Research in Islamic Economics.

Jaelani, Aan, Fiscal Policy in Indonesia: Analysis of State Budget 2017 in Islamic Economic Perspective (October 31, 2017). International Journal of Economics and Financial Issues, Vol. 7, No. 5, 2017, 14-24, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2881093 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2881093

Karim, Adiwarman A. (2007). *Ekonomi Makro Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kahf, Monzer. (1983). Taxation Policy in an Islamic Economy. In Ziauddin Ahmed, Munawar Iqbal, & M. Fahim Khan (Eds.), *Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam* (pp. 114-135). Islamabad, Pakistan: Institute of Policy Studies & International Centre for Research in Islamic Economics.

Murtadho, Ali. (2013). Konsep Fiskal Islam dalam Perspektif Historis, *Economica*, Volume IV, Edisi 1 (Mei)

M Shabri Abd. Majid, S H. Kassim, (2015) Assessing the contribution of islamic finance to economic growth: Empirical evidence from Malaysia, Journal of Islamic Accounting and Business Research 6 (2), 292-310

M Shabri Abd. Majid,(2017) The Motivation of Muzakki to Pay Zakat: Study at the Baitul Mal Aceh, Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi 6 (1), 143 - 158

Nabhani, Taqyiddin. (1996). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam.* Surabaya: Risalah Gusti.

Ritonga, Pandapotan, (2021). Keuangan Negara, Cetakan pertama, Medan, penerbit Umsu Press

Rahmawati, Lilik. (2016). Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam. *Economicus Journal of Economics*, Volume 1, No. 1 (Desember)

Sukirno, Sadono. (2006). *Makro Ekonomi Teori Pengantar.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suprayitno, Eko. (2011). *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yusoff, Mohammed. (2006). Fiscal Policy in an Islamic Economy and the Role of Zakat. *IIUM Journal of Economics and* Management, 14(2), 117-145.